

BAB V1

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Dalam rangka penanggulangan dampak Covid-19 di desa Ile Gerong khususnya dalam hal ekonomi, pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat melalui mekanisme yang telah ditentukan. Jika dilihat efektivitasnya melalui:

1. Pendekatan Sumber

pendekatan sumber, dana BLT diambil dari Dana Desa di bidang penanggulangan keadaan mendesak sebesar Rp.100.800.000 dan dibagikan kepada 28 KPM.

2. Pendekatan Proses

aspek pendekatan proses, proses pendataan, konsolidasi dan validasi yang dilakukan pemerintah desa sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku.

3. Pendekatan Sasaran

pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tepat dan digunakan sesuai dengan tujuan adanya BLT-DD ini. Hal tersebut berdasarkan pernyataan yang dikemukakan oleh masyarakat yang merasakan secara langsung dampak dari BLT-DD dalam situasi Covid-19.

4. Faktor pendorong

Kesiapan kelembagaan dan komitmen para pelaku yang terlibat langsung dalam prosesnya, baik di dalam desa maupun dari para pendamping serta Sederhananya kriteria yang menjadi acuan dalam penentuan calon penerima sehingga membuat prosesnya berjalan transparan dan akuntabel.

5. Faktor Penghambat

Lemahnya koordinasi kebijakan, data dan implementasi di lapangan membuat desa berada pada posisi yang terpaksa banyak

mengalah. Salah satu akibat yang terlihat, penyaluran dana kepada penerima pun terlambat.

6.2 SARAN

1. Bagi Pemerintah Desa

Untuk kedepannya pemerintah desa harus lebih memaksimalkan sisi transparansi mengenai mekanisme dan penjangkaran dalam menetapkan petugas di lapangan harus lebih dikuatkan, serta upaya untuk membuka aspek komunikasi diperlukan secara lebih luas agar kedepannya tidak terjadi lagi permasalahan yang berpotensi untuk mengikis pemerataan dan keadilan

2. Bagi Masyarakat

- Masyarakat perlu lebih bijak dalam memanfaatkan BLT-DD untuk meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut sebagai modal untuk lebih melangkah maju, misalnya membuka peluang usaha secara individu atau kelompok sehingga kehidupan masyarakat lebih terjaga secara kualitas ekonomi, dalam rangka bertahan hidup di masa krisis seperti sekarang ini.
- Kesadaran dan inisiatif yang besar memang dibutuhkan untuk menyampaikan keluhan kesah kepada pihak yang berwenang mengenai persoalan BLT-DD yang mungkin masih banyak ditemukan tidak tepat sasaran sehingga terwujudnya pemerataan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- DunnWilliamN. 2003: *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- GieThe Liang .2006. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- James L. Gibsun 2011, *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*, Edisi ke-5.Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Komarudin, 2005, *Ensiklopedia Manajemen*, Bandung, Alfabeta.
- Lubis, H & Husain, M, 2009.*Efektivitas Pelayanan Publik*, Cetaka Kesebelas Pustaka Binaman Presindo.Jakarta
- Makmur. 2010. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung:Refika Aditama.
- Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya.
- Pasolong, Harbani. 2012. *Teori Administrasi Publik..* Yogyakarta: Alfabeta.
- Robbins Stephen P. 2008, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1 & 2, Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka, Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Suharto. Edi. 2007. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Steers M. Richard, 2008, *Efektivitas Organisasi*, diterjemahkan Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Sugiyono.2010, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*; Penerbit CV Alfabeta, Bandung.
- Oscar Lewis 2006, *Pembangunan Pertanian dan permasalahannya*, PT Pradnya Paramita Jakarta
- Wynandin, 2008, *Pendataan Program Perlindungan Sosial PPLS 2008*, Bappenas, Jakarta

Sugyono,2010:23,*Efektifitas Pembelajaran Dengan Menggunakan Metode Praktik*,Rineka Cipta Jakarta

William N. Dunn (2005:498)*Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Ke Dua*Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Gie The L 2006:149*Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Handoko (2008:7)*Manajemen personalia dan sumber daya manusia edisi ke dua*.Yogyakarta: Penerbit BPFE

Harbani Pasolong(2012:51) *Teori Administrasi Publik*.Yogyakarta: Alfabet.

James L. Gibson dkk (2006:38) *Organisasi Dan Manajemen*. Edisi Terjemahan. Jakarta:Erlangga.

Komaruddin (2005:294) *Strategi Pembelajaran Aktif*. Yogyakarta: Insan Madani.

The Liang Gie (2006:24)*Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung.

Gibson (2011: 28) *Bimbingan Dan Konseling*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Steers (2008:87) *Motivation and work Behavior*. New york: Me Graw Hill Bool Company

P. Robbins (2008:85) *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat

Siagian (2010:151) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara,Jakarta.

Makmur (2010:7) dalam bukunya *efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Pustaka Binaman Presindo. Jakarta.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55) *Pengantar Teori Organisasi*

Todaro menyebutkan,et al (2015) *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Jakatra: Erlangga.

(Yunus, 2007) *Keterampilan Dasar Menulis*. Jakarta : Universitas Terbuka.

Edi Suharto (2007:142) *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Oscar Lewis (2006). "*Kebudayaan Kemiskinan*" dalam *Kemiskinan Di Perkotaan* dalam Parsudi Suparlan (ed). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Bogdan dan Taylor (dalam Sujarweni, 2014). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Terjema dari Arief Ruchan, Surabaya: Usaha Nasional

Albercht dalam Lovelock, 1992 (dalam Sedarmayanti 2010:243)

Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong 2013: 128)

Sumber Lainnya:

- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa
- (Badan Pusat Statistik)
- (<http://tnp2k.go.id/>)
- Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 2 Tahun 2021, hlm. 107-119
- [https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa. 20 Mei 2020](https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--bantuan-langsung-tunai-dari-dana-desa.20%20Mei%2020)
- Keputusan Menteri PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik